

**Kepemimpinan Dinasti Mughal sebagai Solusi Intoleransi Beragama di Indonesia
Perspektif Moderasi Beragama**

Raya Hidayat¹ & Fadil SJ²

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang^{1,2}

E-mail: 240201210031@student.uin-malang.ac.id¹, fadilsj@syariah.uin-malang.ac.id²

Abstract: *The Leadership of the Mughal Dynasty as a Solution to Religious Intolerance in Indonesia from the Religious Moderation's Perspective.* Indonesia has a long history of issues regarding religious tolerance violations. If left unchecked, this can lead to societal disintegration. Therefore, it is essential to identify exemplary models of religious tolerance within the Islamic world. One such model can be drawn from the Mughal Dynasty in India, considering the similarities between Indonesia and India as two nations with diverse cultures. Thus, examining the leadership of the Mughal Dynasty as a solution to religious intolerance in Indonesia becomes an interesting subject of study. This research aims to assess the relevance of the Mughal Dynasty's leadership in relation to the concept of religious moderation. This study employs a qualitative research approach with a historical method, grounded in library research. The findings indicate that the Mughal Dynasty's leadership, characterized by its tolerance, can serve as a solution to address religious intolerance in Indonesia. The Mughal Dynasty's tolerant leadership style in India aligns well with the understanding of religious moderation.

Keywords: Mughal, Religious Intolerance, Religious Moderation.

Abstrak: *Kepemimpinan Dinasti Mughal sebagai Solusi Intoleransi Beragama di Indonesia Perspektif Moderasi Beragama.* Indonesia memiliki banyak riwayat pelanggaran terhadap permasalahan toleransi beragama. Hal ini jika dibiarkan akan menyebabkan disintegrasi di masyarakat. Maka perlu, untuk menemukan percontohan yang baik dari Toleransi beragama di dunia Islam. Percontohan tersebut perlu diambil dari Dinasti Mughal di India, mengingat bahwa Indonesia dan India merupakan dua negara dengan kebudayaan yang beragam. Oleh karena itu, pengkajian terhadap Kepemimpinan Dinasti Mughal sebagai solusi intoleransi beragama di Indonesia menarik untuk dikaji. Lalu, penilitan ini akan meninjau relevansi kepemimpinan dinasti Mughal tersebut dengan tinjauan Moderasi beragama. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan historis yang berbasis pada *Library Research*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kepemimpinan dinasti Mughal dengan konsep toleransi dapat dijadikan solusi intoleransi beragama di Indonesia. Kepemimpinan dinasti Mughal di India yang bercorak toleransi sejalan dengan pemahaman moderasi beragama.

Kata kunci: Mughal, Intoleransi Beragama, Moderasi Beragama.

Pendahuluan

Indonesia memiliki banyak riwayat pelanggaran terhadap permasalahan toleransi beragama. Diantara beberapa kasus tersebut adalah pelarang beribadah bagi jemaat kristen di Bandar Lampung (Saputra, 2023). Lalu, penghambatan pembangunan masjid di Palembang oleh oknum (Dwi,

2023). Terdapat pula larangan beribadah Natal di Cibinong, Bogor (Kompas.com, 2024). Oleh karena itu, permasalahan intoleransi beragama di Indonesia ini sangat perlu untuk dicegah. Hal ini jika dibiarkan akan menyebabkan disintegrasi di masyarakat yang merusak stabilitas sosial politik. Maka perlu, untuk menemukan

percontohan yang baik dari Toleransi beragama di dunia Islam.

Keberadaan Mughal di India adalah keunikan tersendiri mengingat Islam merupakan agama yang berbeda dari agama yang umumnya dianut masyarakat setempat. Jejak Islam di India terlihat dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari arsitektur hingga tradisi budaya. Salah satu warisan paling mencolok adalah Taj Mahal, sebuah mahakarya arsitektur yang dibangun oleh Dinasti Mughal. Kemajuan peradaban ini tentu didukung oleh stabilitas sosial-politik yang memadai.

Indonesia dan India merupakan dua negara dengan kebudayaan yang beragam. Maka tepat kiranya, penelitian terhadap sejarah kesuksesan kepemimpinan Dinasti Mughal di India menjadi percontohan penyelesaian intoleransi di Indonesia. Oleh karena itu, pengkajian terhadap Kepemimpinan Dinasti Mughal sebagai solusi intoleransi beragama di Indonesia menarik untuk dikaji. Lalu, penelitian ini akan meninjau relevansi kepemimpinan dinasti Mughal tersebut dengan tinjauan Moderasi beragama.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang mengedepankan data deskriptif dan menjadi bagian untuk menganalisa pengetahuan sosial (Safrudin, Zulfamanna, Kustati, & Sepriyanti, 2023). Penelitian ini berbasis pada penelitian kepustakaan (Haryono et al., 2024). Oleh karena itu, penelitian ini akan mengkaji sumber kepustakaan yang relevan dalam bahasan penelitian ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan historis. Pendekatan historis yang digunakan bertujuan untuk mengetahui data-data masa lalu menjadi sebuah fakta yang dapat

diambil kemanfaatannya secara obyektif (Rustamana, Zahwan, Hilmani, Selma, & Narendra, 2024). Oleh karena itu, penelitian ini akan mengkaji secara historis dari pada kepemimpinan Dinasti Mughal di India.

Hasil dan Pembahasan

Penyebaran Islam di India

Perkembangan Islam di India dimulai dengan penyebaran di daerah anak benua India. Penaklukan India dirintis oleh Dinasti Umayyah yang dimulai sejak abad VII M. daerah taklukan di India pada Masa Umayyah adalah Punjab, Multan, Sind, dan Balukistan. Walaupun demikian, pengaruh pemerintah belum sampai di India. Sehingga, daerah ini lambat laun terlepas kembali. Pada masa Abbasiyah pun India telah dikuasai oleh dinasti Islam. Akan tetapi, karena melemahnya pengaruh pemerintahan pusat, dinasti-dinasti kecil yang ada di wilayah yang jauh dari pusat dinasti Abbasiyah tersebut mendirikan dinasti sendiri, contohnya adalah Dinasti Ghaznawiyah. Di masa ini untuk mempertahankan pengaruh Islam di India Dinasti Ghaznawi tercatat telah melakukan 17 kali serangan ke India (Achiriah & Rohani, 2018).

Dinasti Mughal merupakan keturunan dari Hulagu Khan yang merupakan peruntuh kedigjayaan dinasti Abbasiyah. Akan tetapi, keturunan orang tersebut menjadi penyebar Islam yang hebat. Pendiri kerajaan Mughal adalah Zahiruddin Muhammad Babur di tahun 1526 M. Ia merupakan penguasa daerah Ferghana. Ia merupakan seorang pendatang dari Asia Tengah dan seorang cucu dari seorang penguasa kerajaan Mongol. Babur berhasil menduduki Samarkand dengan bantuan Kerajaan Safawi. Perluasan wilayahnya berlanjut hingga ke Afghanistan dan menuju India (Khumayroh, 2024).

Awal berdiri dinasti Mughal didukung dari dua faktor. Pertama, Babur memiliki sifat yang mewarisi bangsa Mongolia yang terkenal perkasa. Kedua, India bersamaan dengan waktu ekspansi yang dilakukan Babur, sedang mengalami krisis. Babur berhasil menjatuhkan kekuasaan Ibrahim Lodi, pimpinan Dinasti Lodi di Delhi. Pertempuran dahsyat tersebut terjadi pada 21 April 1526 M. Sultan Babur sebagai pendiri wafat karena sakit keras di tanggal 26 Desember 1530 M. Kepemimpinannya dilanjutkan oleh anaknya, Nasiruddin Muhammad Humayun (Fitrah Aidil et al., 2024).

Sultan Humayun memimpin Mughal selama 9 tahun. Akan tetapi, kepemimpinan dari Humayun tidak secakap ayahnya. Sehingga, kondisi pemerintahan yang dipimpin olehnya tidak secakap ayahnya. Ia harus berperang melawan penguasa Gujarat, Bahadur Syah. Lalu pemberontakan Sher Khan Shah, pimpinan daerah Kanauj. Bahkan, dalam perang tersebut Humayun harus mundur ke Persia untuk meminta bantuan. Pada tahun 1555 M, Humayun kembali ke India setelah mengatasi segala pemberontakan (Syamruddin Nasution, 2013).

Kemajuan Dinasti Mughal

Kemajuan dinasti Mughal terdapat pada masa kepemimpinan empat sultan, diantaranya adalah Akbar (1556-1605 M), Jahangir (1605-1628 M), Syah Jehan (1628-1658 M), dan Aurangzeb (1658-1707 M). Akbar yang memimpin sejak usia belia, 14 tahun, menyerahkan tampuk kepemimpinannya sementara waktu kepada Bairam Khan. Akan tetapi, dikarenakan pengaruh yang semakin kuat sehingga mengalahkan pengaruh Akbar, keduanya berperang dan Akbar keluar sebagai pemenang. Masa awal kepemimpinan Akbar

diwarnai dengan ekspansi kekuasaan. Daerah seperti Chundar, Kalinjar, Kashmir, Narhala telah ditundukkan dibawah kepemimpinan Akbar. Mughal menjadi kerajaan besar dengan corak pemerintahan militeristik. Akbar mengembangkan politik '*Sulakhul*' (toleransi universal). Pemikiran politik ini dikembangkan dengan tujuan untuk mengajarkan kesetaraan diantara masyarakat India, tanpa perbedaan etnis dan agama (Lubis, Muhajir, & Zaini Dahlan, 2021).

Kejayaan yang dibuat dinasti Mughal terdapat pada sektor perekonomian. Bahkan, pajak pendapatan negara terbesar berpusat di sektor pertanian. Hasil pertanian ini menyokong kebutuhan dalam negeri dan peran perdagangan internasional yang dilakukan oleh Mughal. Mitra dagang Mughal bahkan hingga ke Eropa dan Afrika. Hasil pertanian, harta rampasan perang dalam ekspansi wilayah Akbar, dan pembayaran upeti telah ikut menyokong perekonomian Dinasti Mughal. Akbar menetapkan dua macam pajak. Pertama, pajak tinggi untuk pejabat. Dua, pajak rendah bagi kaum yang ekonominya rendah. (Ulpah, Yusuf, & Rachmatika, 2024)

Kemajuan Mughal di masa Akbar merupakan hasil dari dukungan politik masyarakat India pada umumnya. Hal ini dikarenakan corak kepemimpinan Akbar yang menerapkan nilai kesetaraan dan toleransi. Sehingga, masyarakat dari non-muslim pun ikut senang dalam kepemimpinan Akbar. Sultan Akbar memiliki beberapa kebijakan yang diantaranya adalah menghapus praktik Jizyah di India, mendirikan sekolah tanpa memandang ras dan agama, praktik pernikahan campuran di India, menghapus pajak yang menyengsarakan rakyat, dan menghapus perbudakan. Bahkan, secara ekstrim Akbar menawarkan pemahaman

baru berupa Din-Illahi. Kebijakan-kebijakan tersebut berdampak pada sistem kasta di India menjadi terhapus.(Pertiwi & Setiawati, 2022) Oleh karena itu, Banyak sumber menyebutkan bahwa Mughal merupakan dinasti yang memimpin kemajemukan sosio-antropologi masyarakat India. Maka tak heran, terdapat perbedaan pandangan diantara para sultan, seperti syi'ah dan sunni. Oleh karena itu, akulturasi budaya tidak dapat dihindarkan.(Fisher, 2018)

Din Illahi sebagai sebuah pemahaman baru yang ditawarkan pada masa itu, terbentuk oleh beberapa faktor pendukung. Diantara faktor pendukung tersebut yaitu, Pertama, perbedaan pendapat diantar para ahli agama dalam beberapa permasalahan agama. Kedua, Ahli agama di In. dia banyak menawarkan fanatisme sehingga membawa dampak pertikaian di Grass root. Ketiga, Sultan akbar dipengaruhi oleh penasehat keagamaan yang cenderung berpikir liberal dan radikal, seperti Abdul Lathif, Syaikh Mubaraq, dan Abu Fadhl. Sehingga, hal ini telah berdampak pada warna kebijakan Akbar (Rizqina Tsania, Helmi Mukaromah, & Rifatul Muazaroh, 2023).

Kemunculan Din Ilahi menuai kontroversi dari pelbagai kalangan di umat islam. hal ini dikarenakan ajaran Din Ilahi menyeleweng dari konsep ajaran agama Islam. Ajaran ini merupakan akulturasi antara kebudayaan india-agama non muslim dan islam. diantara ajaran dalam aliran ini adalah mengganti salam dengan “Allahu akbar” dan jawaban “jalla jalalahu”. Penerimaan murid baru Din Illahi hanya di hari minggu. Penganut Din Illahi dilarang untuk berhubungan seksual dengan perempuan tak subur. Terdapat penandatanganan kontrak apabila menjadi anggota Din Ilahi. Ajaran pada aliran ini mengagungkan Sultan Akbar. Karena tiada

paksaan seseorang untuk memeluknya, maka setelah meninggalnya sultan Akbar pengikut ajaran ini berkurang (F. D. Sari, 2024).

Kemajuan Mughal terdapat pada sektor Kesenian, akan tetapi tidak dibidang Pengetahuan. Penyair terkenal di masa Mughal bernama Malik Muhammad jayazi. Beberapa raja Mughal juga merupakan sastrawan diantaranya adalah Babur dan Jehangir. Sejarawan terkenal di masa Mughal diantara adalah Abul Fadhl. Pada kepemimpinan Sultan Syah jahan telah dibangun Taj mahal yang memiliki nilai arsitektur dan estetika yang tinggi. Terdapat pula masjid Moti di Agra yang terbuat dari marmer (Afkari, 2020). Akulturasi budaya yang terjadi di India menjadi bukti perkembangan peradaban yang merupakan dampak kekuasaan Mughal. Raja Akbar memerintahkan penggunaan kalender Islam sebagai pengganti kalender sansekerta (Faidi, 2020).

Dinasti Mughal memberikan dukungan terhadap pendidikan masyarakatnya. Hadiah tanah dan uang diberikan kepada para ahli ilmu di masa Mughal. Bahkan, jika terdapat orang kaya yang meninggal dunia tanpa memiliki ahli waris, maka pemerintah wajib menggunakan harta tersebut untuk pembangunan sekolah. Perguruan tinggi diadakan di Delhi. Aurangzeb juga banyak membangun sekolah demi menyokong pendidikan disana. Walaupun demikian. Akses pendidikan bagi wanita tidak seleluasa kaum pria (Fu'ad, 2016). Perlu dicatat bahwa terdapat pemikir pembaharuan pendidikan yang bernama Sayyid Ahmad Khan merupakan anak dari pejabat istana Mughal, Mir Muttaqi. Hal ini menjadi indikasi bahwa Mughal juga berperan dalam membangun peradaban di India (Usman & Baharil, 2020).

Kemunduran Dinasti Mughal

Masa kepemimpinan Aurangzeb diwarnai dengan beberapa kebijakan yang intoleran, sehingga berkebalikan dengan corak kepemimpinan Akbar. Dengan bercita-citakan negara islam, Aurangzeb mulai menerapkan kebijakan intoleran atas kemajemukan di India. Diantaranya adalah Perayaan keagamaan dimasa ini dibatasi, seperti diwali, holi, dan tazia. Jizyah di masa ini juga diberlakukan kembali, dengan dasar tujuan agar banyak masyarakat India masuk Islam. sehingga, mereka dapat terhindar dari jizyah. Aurangzeb juga kerap meruntuhkan kuil peribadatan umat lain. Bahkan, ia pernah melakukan penodaan terhadap Kuil Hindu Chintaman di Ahmedabad dengan membunuh sapi (Isnaini, 2021).

Pada tahun 1707 M, setelah wafatnya Aurangzeb, Dinasti Mughal mulai mengalami kemunduran diakibatkan gagalnya suksesi kepemimpinan pada generasi mendatang. Daerah-daerah Mughal yang sebelumnya dibawah kekuasaan Mughal, mulai memisahkan diri menjadi Independen. Raja-raja Hindu di India mulai berkuasa kembali. kelompok keagamaan sikh dan jat di Punjab membuat rezimnya sendiri. Hal ini membawa implikasi bahwa kelompok-kelompok kecil tersebut telah menyebabkan pergolakan sosio-politik di India. Sehingga dampak dari ketidakstabilan ini adalah masuknya kolonialisme Inggris di India yang menjadi awal dari kehancuran Dinasti Mughal (Husna & Khairi, 2024).

Inggris di India selaku pihak yang memiliki peran penting bagi Masyarakat India pada sektor Perdagangan, mendapat dukungan dari masyarakat setempat. Negeri-negeri anak benua India memberi restu keberadaan Inggris. Hal ini diakibatkan Mughal tidak mampu memimpin keberagaman sosio-antropologi yang ada di India. Orang hindu merasa

tersisihkan (Kulsum, 2021). Bahkan, disaat yang bersamaan kekuatan militer Dinasti Mughal mengalami stagnansi perkembangan. Sehingga, tidak sebanding dengan kekuatan Militer Inggris. Hal ini menyebabkan Mughal secara pertahanan menjadi kerajaan yang rapuh. Sehingga, Inggris mampu menaklukkan Mughal (Zalukhu, 2024).

Keruntuhan mughal pada dasarnya dipengaruhi oleh dua faktor, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor Internal keruntuhan Mughal adalah gagalnya suksesi kepemimpinan, tindakan foya-foya pejabat pemerintah yang merujuk pada kemerosotan moral, pemaksaan ajaran tertentu (syi'ah), kebijakan Puritanisme yang memaksa India untuk memeluk Islam sehingga Diskriminasi sangat mencolok, dan lemahnya kemampuan kepemimpinan para sultan penerus setelah Aurangzeb. Lalu, faktor eksternal keruntuhan dinasti Mughal adalah pemberontakan rezim-rezim kecil (sikh dan Hindu) di daerah, serangan dari luar daerah India, dan kedatangan inggris dalam bentuk perusahaan dagang IEC. Perlawanan terakhir dinasti Mughal dilakukan oleh sultan Bahadur Syah II yang berakhir kekalahan dan dasingkan di Burma. Dinasti Mughal resmi berakhir di tahun 1858 M (Basri, Tasya, Mawaddah, & Zakiyah, 2023). Walaupun demikian, Benih-benih islam di India-pakistan pada kemudian hari akan melahirkan tokoh pembaharuan pemikiran islam, seperti Ahmad Khan, Muhammad Iqbal, dan Fazlurrahman (Nurisman, 2021).

Moderasi Beragama

‘Moderasi’ merupakan kata dalam bahasa latin yang berasal dari kata ‘*Moderatio*’. ‘*Moderatio*’ dapat diartikan sebagai sesuatu yang seimbang, dimana tidak kurang maupun berlebihan. Kata

‘moderasi’ memiliki keselarasan makna dengan ‘*wasathiyah*’ yang dalam bahasa arab dapat dimaknai sebagai pertengahan, tidak berat sebelah. Dalam bahasa inggris, keselarasan makna moderasi dapat ditemui pada kata ‘*core*’, ‘*non-aligned*’, dan lain sebagainya. Maka secara kebahasaan moderasi dapat dipahami sebagai suatu posisi yangmana berada ditengah-tengah dan tidak condong ke kanan maupun ke kiri (Akbar, Lailatul Fasha, & Abdullah, 2024).

Moderasi beragama merupakan sebuah langkah dalam menjalankan pesan-pesan keagamaan secara tepat dan proporsional dengan menerapkan nilai-nilai demokratis dan kemanusiaan sehingga mampu mewujudkan sistem kemasyarakatan agamis yang mampu menerima perbedaan (Munif, Qomar, & Aziz, 2023). Moderasi beragama pada dasarnya diarahkan untuk menghindarkan seseorang dari dua sikap, yaitu berlebih-lebihan dalam beragama dan kecenderungan meremehkan/memudahkan hal-hal keagamaan (D. I. Sari, Darlis, Silaen, Ramadayanti, & Tanjung, 2023). Oleh karena itu, tujuan utama dari moderasi beragama adalah menjalankan keagamaan secara proporsional dan mengakui adanya perbedaan diantara masyarakat.

Moderasi beragama sebagai sebuah konsep pemahaman terhadap realitas perbedaan memiliki empat indikator yang perlu dipenuhi (Jamaluddin, 2022). Indikator-indikator tersebut adalah komitmen kebangsaan, anti terhadap kekerasan, menerima kebudayaan lokal (*local wisdom*), dan toleransi. Terdapat pula beberapa nilai-nilai kehidupan yang dapat mencerminkan moderasi beragama (Albana, 2023). Diantara nilai-nilai tersebut adalah egaliter, menerima pembaharuan, seimbang, kesediaan musyawarah, dan toleransi beragama.

Moderasi beragama ditemukan dalam Pancasila yang menjadi pandangan hidup masyarakat di Indonesia (Islamy, 2022). nilai toleransi termuat dalam sila pertama. Nilai anti radikalisme menjadi cerminan bagi sila kedua pancasila bahwa kemanusiaan sudah semestinya diutamakan. Nilai kebangsaan termuat dalam sila ketiga yang menjunjung persatuan dalam perbedaan di Indonesia. nilai penerimaan terhadap *local wisdom* merupakan bagian dari sila keempat dalam menerima perbedaan pendapat. Nilai sosialisasi dalam perbedaan tercermin pada sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Moderasi beragama di Indonesia telah dijadikan bagian dari kurikulum pendidikan di Indonesia (Suryadi, 2022). Hal ini mengisyaratkan pentingnya moderasi beragama di lingkungan masyarakat yang multikultural seperti Indonesia (Prakosa, 2022). Keberadaan moderasi beragama dalam pendidikan di Indonesia diharapkan menjadi bagian dari internalisasi nilai-nilai penerapan keagamaan secara lebih moderat (Rahmat & Nuraisyah, 2022). Bahkan, sekolah dasar di Indonesia juga mengajarkan nilai moderasi beragama (Lessy et al., 2022). Oleh karena itu, indonesia cukup memperhatikan moderasi beragama di Indonesia

Kepemimpinan Dinasti Mughal sebagai Solusi Intoleransi Beragama di Indonesia Perspektif Moderasi Beragama

Kepemimpinan dinasti Mughal di India merupakan sebuah realita yang menarik. Hal ini dikarenakan dinasti Mughal yang merupakan dinasti islam menjadi pemerintahan ditengah masyarakat yang memiliki agama yang justru berbeda dari agama dinasti penguasa setempat. Kepemimpinan atas kekuasaan Mughal di India ini tidak akan dapat berjalan dengan

baik jika dinasti mughal tidak menerapkan nilai-nilai moderasi beragama dalam pemerintahan. Sultan Akbar merupakan inisiator besar dalam menerapkan moderasi beragama di Dinasti Mughal. Hal ini tercermin dalam politik toleransi universal yang diterapkan. Sebagaimana penjelasan terdahulu, stabilitas politik dan sosial di masa sultan Akbar menjadi tumpuan bagus yang menopang kemajuan-kemajuan di masa dinasti Mughal. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan yang bercirikan toleransi di India pada masa Sultan akbar telah menjadi bukti dan contoh bahwa persatuan menjadi landasan dalam membangun peradaban.

Dalam sejarah dinasti mughal, kenyataan bahwa Pola kepemimpinan Aurangzeb menjadi titik awal perseteruan sosial yang mengancam Stabilitas sosial-politik. Aurangzeb memimpin India dengan memaksakan keyakinan yang diyakininya. Oleh karena itu, titik awal kemunduran Mughal ada di masa kepemimpinan Aurangzeb dan diiringi oleh faktor kemunduran lainnya. Oleh karena itu stabilitas sosial dan politik dalam pemerintahan sangatlah penting.

Masa kepemimpinan sultan akbar sejalan dengan pemahaman moderasi beragama. Empat indikator dari moderasi beragama, yakni komitmen kebangsaan, anti terhadap kekerasan, menerima kebudayaan lokal (*local wisdom*), dan toleransi, telah tampak pada kepemimpinan sultan akbar. Sultan akbar mendirikan paham *Din Ilahi*, tetapi sultan akbar tidak memaksakan keyakinan tersebut. Kebijakan sultan akbar diwarnai dengan nilai-nilai moderasi beragama. Diantara contohnya adalah pendirian sekolah tanpa memandang ras dan agama. Hal ini membuat masyarakat india sewaktu itu dapat menjalankan keyakinannya dan berkehidupan sosial dengan nyaman.

Kesimpulan

Kepemimpinan dinasti Mughal dengan konsep toleransi dapat dijadikan solusi intoleransi beragama di Indonesia. Hal ini didasarkan kenyataan bahwa Mughal mampu memimpin kekuasaan ditengah multikulturalitas di India. Maka solusi agar peradaban di Indonesia dapat berkembang adalah dengan mewujudkan stabilitas sosial-politik melalui toleransi yang diwujudkan dalam kepemimpinan.

Kepemimpinan dinasti Mughal di India yang bercorak toleransi sejalan dengan pemahaman moderasi beragama. Oleh karena itu, corak kepemimpinan toleran harus pula dilaksanakan di Indonesia yang memiliki masyarakat majemuk. Keberlangsungan pemahaman toleransi dalam kemajemukan di Indonesia akan menghentikan intoleransi di Indonesia. Sehingga, indonesia dapat fokus membangun peradaban dengan dukungan stabilitas sosial dan politik.

Referensi

Buku:

- Achiriah, & Rohani, L. (2018). *Sejarah Peradaban Islam Klasik*. Medan: PERDANA PUBLISHING.
- Fu'ad, ah. Z. (2016). *Sejarah Peradaban Islam Paradigma Tekn, Reflektif, dan Filosofis*. Surabaya: Fakultas Tarbiyah. Diambil dari <http://digilib.uinsa.ac.id/20102/>
- Kulsum, U. (2021). *Sejarah Peradaban Islam Klasik & Pertengahan*. Pamekasan: Duta Media Publishing.
- Nurisman. (2021). *Keluar dari Krisis Pembaruan Pemikiran Islam di India dan Pakistan*. Sleman: Kalimedia.
- Syamruddin Nasution. (2013). *Sejarah Peradaban Islam*. Pekanbaru: Yayasan Pusaka Riau.

Artikel Jurnal:

- Afkari, S. G. (2020). Dinamika Pertumbuhan Pendidikan Islam Periode Pertengahan. *TANJAK: Journal of Education and Teaching*, 1(1), 73–86. <https://doi.org/10.35961/tanjak.v1i1.82>
- Akbar, F. H., Lailatul Fasha, F., & Abdullah, F. (2024). Konsep Moderasi Beragama dalam Tinjauan Qur'an Hadis. *Bulletin of Islamic Research*, 2(1), 59–80. <https://doi.org/10.69526/bir.v2i1.21>
- Albana, H. (2023). Implementasi Pendidikan Moderasi Beragama di Sekolah Menengah Atas. *Jurnal SMART (Studi Masyarakat, Religi, dan Tradisi)*, 9(1), 49–64. <https://doi.org/10.18784/smart.v9i1.1849>
- Basri, M., Tasya, M. F. A., Mawaddah, N., & Zakiyah. (2023). KEMUNDURAN DAN KEHANCURAN KERAJAAN MUGHAL. *JURNAL KUALITAS PENDIDIKAN*, 1(2), 250–257.
- Faidi, A. (2020). Akulturasi Budaya Islam dan India: Tinjauan Historis Terhadap Dialektika Kebudayaan Islam di India. *Warisan: Journal of History and Cultural Heritage*, 1(2), 46–54. <https://doi.org/10.34007/warisan.v1i2.408>
- Fisher, M. H. (2018). Islam in Mughal India. *Oxford Research Encyclopedia of Religion*. <https://doi.org/10.1093/acrefore/9780199340378.013.648>
- Fitrah Aidil, Sarimah Nur, Febriani Elga, Dinda, K., Fitriani Novita, & Noviani Dwi. (2024). Sejarah Perkembangan Dinasti Mughal dan Penguasa Muslim di Tanah India Tahun 1525-1857. *Mutiara : Jurnal Penelitian dan Karya Ilmiah*, 2(1), 283–296.
- Haryono, E., Suprihatiningsih, S., Septian, D., Widodo, J., Ashar, A., & Sariman. (2024). New Paradigm Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research) di Perguruan Tinggi. *An-Nuur The Journal of Islamic Studies*, 14(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.58403/annuur.v14i1.391>
- Husna, F., & Khairi, R. (2024). Kehancuran Kerajaan Mughal dan Kehancuran Kerajaan Usmani. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(12), 827. Diambil dari <https://doi.org/10.5281/zenodo.10465323>
- Islamy, A. (2022). Moderasi Beragama Dalam Ideologi Pancasila. *POROS ONIM: Jurnal Sosial Keagamaan*, 3(1), 18–30. <https://doi.org/10.53491/porosonim.v3i1.333>
- Isnaini, S. (2021). Kebijakan Politik Keagamaan Sultan Akbar Agung dan Abul Muzaffar Muhiuddin Aurangzeb. *Tsaqofah dan Tarikh: Jurnal Kebudayaan dan Sejarah Islam*, 5(2), 49. <https://doi.org/10.29300/ttjksi.v5i2.3424>
- Jamaluddin, J. (2022). Implementasi Moderasi Beragama di Tengah Multikulturalitas Indonesia (Analisis Kebijakan Implementatif pada Kementerian Agama). *AS-SALAM Jurnal Ilmiah Ilmu-ilmu Keislaman*, 7(1), 1–13. Diambil dari <https://journal.stai-yamisa.ac.id/index.php/assalam/issue/view/10>
- Khumayroh, W. (2024). Pengaruh Dinasti Mughal dalam Alkuturasi Islam dan Budaya India (1556-1707). *Prosiding Konferensi Nasional Mahasiswa Sejarah Peradaban Islam (KONMASPI)*, 1. Diambil dari <https://proceedings.uinsa.ac.id/index.php/konmaspi%0APengaruh>
- Lessy, Z., Widiawati, A., Alif, D., Himawan, U., Alfiyaturrahmah, F., & Salsabila, K. (2022). Implementasi Moderasi Beragama Di Lingkungan Sekolah Dasar. *Paedagogie: Jurnal Pendidikan dan studi Islam*, 3(02), 137–148. Diambil dari <http://ejurnal.staimuttaqien.ac.id/index.php/paedagogie/article/view/761>
- Lubis, D. E., Muhajir, A., & Zaini Dahlan.

- (2021). Peradaban dan Pemikiran Islam Pada Masa Dinasti Mughal di India. *Islamic Education*, 1(2), 41–46. <https://doi.org/10.57251/ie.v1i2.49>
- Munif, M., Qomar, M., & Aziz, A. (2023). Kebijakan Moderasi Beragama di Indonesia. *Dirasah*, 6(2), 418–427. Diambil dari <https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/dirasah>
- Pertiwi, P. D., & Setiawati, E. (2022). Tinjauan Historis Pemerintahan Dinasti Mughal Pada Masa Pemerintahan Sultan Akbar Tahun 1556-1605 M. *Swarnadwipa*, 3(3), 157. <https://doi.org/10.24127/sd.v3i3.1960>
- Prakosa, P. (2022). Moderasi Beragama: Praksis Kerukunan Antar Umat Beragama. *Jurnal Ilmiah Religiosity Entity Humanity (JIREH)*, 4(1), 45–55. <https://doi.org/10.37364/jireh.v4i1.69>
- Rahmat, A., & Nuraisyah. (2022). Internalisasi Moderasi Beragama dalam Pendidikan Agama Islam. *Pendidikan Agama Islam*, 01(02), 55–66. Diambil dari <https://journal.uniga.ac.id/index.php/JPAI/article/view/2691>
- Rizqina Tsania, Helmi Mukaromah, & Rifatul Muazaroh. (2023). Islam di India pada Masa Kepemimpinan Sultan Akbar (1556-1605 M). *JSI: Jurnal Sejarah Islam*, 2(01), 39–54. <https://doi.org/10.24090/jsij.v2i01.7456>
- Rustamana, A., Zahwan, A. H., Hilmani, F., Selma, A., & Narendra, D. (2024). METODE HISTORIS SEBAGAI PEDOMAN DALAM PENYUSUNAN PENELITIAN SEJARAH. *Cendekia Pendidikan*, 5(6), 1–10.
- Safrudin, R., Zulfamanna, Kustati, M., & Sepriyanti, N. (2023). Penelitian Kualitatif. *Journal Of Social Science Research*, 3(2), 9680–9694.
- Sari, D. I., Darlis, A., Silaen, I. S., Ramadayanti, R., & Tanjung, A. A. A. (2023). Moderasi Beragama dalam Pendidikan Islam di Indonesia. *Journal on Education*, 5(2), 2202–2221. <https://doi.org/10.31004/joe.v5i2.873>
- Sari, F. D. (2024). KONTROVERSI SINKRETIS AGAMA: DIN ILAHI JALALUDIN AKBAR SEBAGAI WUJUD TOLERANSI DALAM DINASTI MUGHAL (1556-1605). *Sindoro: Cendekia Pendidikan*, 5(3), 1–10. <https://doi.org/doi.org/10.9644/sindoro.v4i5.3317> Pendiri
- Suryadi, R. A. (2022). Implementasi Moderasi Beragama Dalam Pendidikan Agama Islam. *Taklim: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 20(1), 1–12. <https://doi.org/10.17509/tk.v20i1.43544>
- Ulpah, D. M., Yusuf, N., & Rachmatika, T. N. (2024). Sejarah Kebijakan Fiskal: Masa Kerajaan-Kerajaan Kecil (Fathimiyah, Mamalik, Safawiyah Persia, Mughal India Dan Turki Utsmani). *JEMBA: Journal of Economics, Management, Business and Accounting*, 2(1), 63–77. <https://doi.org/10.54783/jemba.v2i1.48>
- Usman, M. I., & Baharil. (2020). Kontribusi Pemikiran Islam Sayyid Ahmad Khan di Dunia Islam India. *Jurnal PAPPASANG*, 2(2), 54–73.
- Zalukhu, D. M. (2024). Dinasti Mughal Dan Kemunduran Islam Di India Tahun 1525-1857 M. *Asas wa Tandhim Jurnal Hukum, Pendidikan & Sosial Keagamaan*, 3(2), 125–134.

Halaman web:

- Dwi, A. (2023). Ketua RW Diduga Hambat Pembangunan 2 Masjid di Palembang. Diambil dari RMOL.id website: <https://rmol.id/nusantara/read/2023/02/14/563589/ketua-rw-diduga-hambat-pembangunan-2-masjid-di-palembang>
- Kompas.com. (2024). Mengapa Warga Melarang Ibadah Natal di Cibinong Bogor? Diambil dari KOMPAS.com website: <https://bandung.kompas.com/read/202>

4/12/12/101042178/mengapa-warga-
melarang-ibadah-natal-di-cibinong-
bogor

dilarang-beribadah-di-gereja

Saputra, T. (2023). Kronologi Jemaat
Kristen Bandar Lampung Dilarang
Beribadah di Gereja. Diambil dari
detikSumut website:
[https://www.detik.com/sumut/hukum-
dan-kriminal/d-6578714/kronologi-
jemaat-kristen-bandar-lampung-](https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-6578714/kronologi-jemaat-kristen-bandar-lampung-)